



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENINGKATAN AKSES KUR UNTUK UMKM

Ari Mulianta Ginting
Analisis Legislatif Ahli Madya
ari.ginting@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah mendorong peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan mempersiapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat mendorong penyaluran KUR kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasio kredit KUR bagi UMKM dengan total sebesar 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024.

UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi seringkali dihadapkan kepada benturan terhadap akses perbankan, khususnya KUR karena terkendala jaminan. Untuk itu, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Yulius menegaskan bahwa berdasarkan peraturan yang baru, KUR akan dapat diberikan kepada UMKM meskipun tanpa ada jaminan, tetapi dengan menggunakan metode skor kredit.

Selama ini pelaku UMKM menghadapi banyak kendala utama dalam mengakses KUR, diantaranya tidak memiliki agunan sebagai jaminan KUR. Skema skor kredit sebagai pengganti jaminan sudah dilakukan di hampir 145 negara. Kemudahan tidak hanya diberikan pada tahap pengajuan, melainkan juga terhadap kredit macet. Pemerintah berencana untuk menghapus tagihan kredit macet tersebut. Kebijakan lainnya yang akan didorong oleh Pemerintah untuk mendorong peningkatan penyaluran KUR bagi UMKM adalah meningkatkan besaran subsidi bunga KUR dan menerapkan suku bunga berjenjang. Contoh peningkatan suku bunga berjenjang adalah pembiayaan pertama KUR Mikro diberi subsidi bunga sebesar 6 persen dan naik menjadi 7 persen pada pembiayaan kedua. Pembiayaan ketiga meningkat kembali menjadi 8 persen dan 9 persen pada pembiayaan keempat.

Langkah pemerintah mempermudah akses KUR bagi UMKM menurut Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Aestika Oryza Gunarto berdampak positif bagi perekonomian. Kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan kredit dan membantu segmen UMKM dapat mengakses pendanaan. Pendanaan selama ini menjadi hal yang krusial bagi UMKM dalam pengembangan usaha. Pertumbuhan KUR bagi UMKM juga diprediksi dapat mendorong roda perekonomian, khususnya bagi pelaku UMKM yang merupakan pelaku ekonomi di "akar rumput", yang selama ini memerlukan akses kredit khususnya KUR.

Namun kebijakan mempermudah KUR bagi UMKM juga bukan tanpa risiko. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual menjelaskan bahwa rencana pemerintah untuk mempermudah akses KUR berdampak pada penyimpangan moral jika tidak diatur secara *rigid*. Untuk itu, pengaturan secara *rigid* kebijakan tersebut diperlukan agar tidak meningkatkan terjadinya KUR yang macet.

Penghapusan KUR yang macet juga dapat menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah. Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia, Badiul Hadi menjelaskan bahwa penghapusan KUR yang macet dan agunan sebagai syarat pengajuan KUR berdampak pada keuangan negara dan perekonomian. Kebijakan tersebut justru dapat menjadi bumerang bagi pemerintah jika tidak ada pengawasan yang ketat dari Pemerintah dan DPR.

Atensi DPR

Rencana kebijakan pelonggaran dan upaya peningkatan akses KUR bagi UMKM memiliki dampak positif bagi para pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan selama ini para pelaku UMKM kesulitan mengakses KUR karena permasalahan yang berkaitan dengan penjaminan. Kebijakan pelonggaran dan peningkatan akses KUR terhadap UMKM juga diharapkan dapat mendorong peningkatan akses KUR yang pada akhirnya dapat mendorong perekonomian. Namun kebijakan ini bukan tanpa risiko dan kendala. Pelonggaran dan peningkatan akses KUR berdampak pada peningkatan risiko KUR yang macet. Penghapusan KUR disertai dengan peningkatan subsidi juga menimbulkan beban bagi keuangan negara. DPR RI, khususnya Komisi VI DPR RI harus dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan tersebut, terutama pada tataran empiris dan praktis. Komisi VI DPR RI juga harus dapat memastikan bahwa kebijakan ini harus memiliki regulasi yang *rigid* dan mengikat demi mencegah terjadinya peningkatan KUR yang macet.

Sumber

Jawa Pos, 10 September 2023;

Koran Tempo, 6,7,8 September 2023.

Minggu ke-1 September
(4 s.d. 10 September 2023)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkofficial

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023